

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN
BATANGHARI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-I
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
NURSAKINA UMMAH
Nim. 07011281621095**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
di Kabupaten Batang Hari Jambi**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

**NURSAKINA UMMAH
07011281621095**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2020

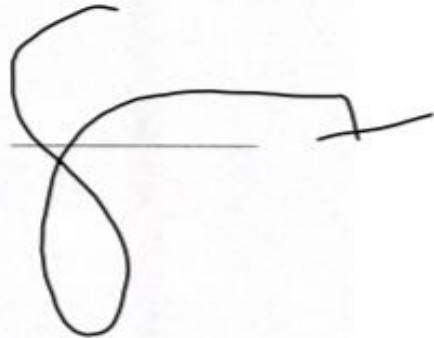
Pembimbing I

**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**



Pembimbing II

**Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 19580609 198403 1002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Batang Hari Jambi” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Palembang, 11 Januari 2021

Ketua

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Anggota

1. Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002
2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003
3. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.*

(Q.S Al insyirah: 6-8)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua saya, Ibu dan Papa.**
- 2. Keluarga besar tercinta.**
- 3. Seluruh dosen Administrasi Publik.**
- 4. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 2016.**
- 5. Almamater Saya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Batang Hari Jambi”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu, Papa dan Keluarga tersayang, H. Muhammad Adip, Hj. Elizar, S.Pd, Rahmat Kurniawan dan M. Rafi Affandi atas doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Marpaung, S.sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. M. H Tamrin, M.Si selaku dosen pembimbing pertama penulis yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pembelajaran dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
9. Bapak H. Verry Ardiansyah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Muhammad Hamdan S.E selaku Sekretaris Desa Desa Hajran beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Hajran.
11. Sahabat kostanku Uul, Mela, Veni, Nabila dan Yola yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat di tanah rantau ini. Terima kasih untuk selalu ada dalam mendengarkan keluh kesah.
12. Sahabat Gu-ku Lijak, Istik, Desi, Pera, Ayuk Tinik, dan Rima yang telah memberi bantuan di masa-masa perkuliahan, terima kasih untuk selalu ada.
13. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Kritik dan saran yang membangun ke arah yang lebih baik dari pembaca sangat diharapkan penulis guna perbaikan di masa yang akan datang. Atas perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2021.

Penulis

ABSTRAK

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Hajran Kabupaten Batang Hari Jambi. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yaitu melalui dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones yang memiliki tiga dimensi yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Batang Hari terutama di Desa Hajran sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kelemahan yaitu belum adanya pembagian tanggung jawab dan wewenang kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat di dalam tim teknis, dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya, sosialisasi yang dilakukan di tingkat kabupaten hanya satu kali dan tidak dilakukannya penyuluhan, dalam tahap pembangunan yang harus dilakukan dengan prinsip gotong-royong belum dilakukan oleh kelompok penerima bantuan.

Kata kunci : Implementasi, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pembimbing I



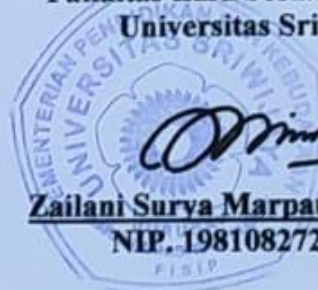
Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II



Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



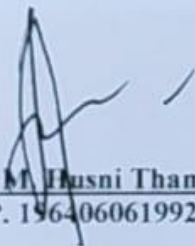
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The self-help housing stimulant assistance program is government support for the low-income communities to encourage and increasing the self-help in improving the house quality and the construction of new houses which include infrastructure, facilities and general utilities. The purpose of this research is to find out how is the implementation of self-help housing stimulant assistance program in Hajran Village, Batang Hari Jambi Regency. The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach. The type and data source used are primary data, namely by conducting a direct interviews with the informants and secondary data, namely through the documents and the regulations relating to the self-help housing stimulant assistance program. This study uses the implementation theory of Charles O. Jones which has three dimensions, including organization, interpretation and application. The results of this study showed that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Batang Hari Regency, especially in Hajran Village, was running well but there are still weaknesses, such as there is no division of responsibilities and work authority for each Regional Apparatus Organization that has involved in the technical team, in implementing the stimulant assistance program, socialization was conducted at the district level only once and no counseling was conducted, in the development process that must be conducted on the principle of mutual assistance has not been done by the group of recipients assistance.

Keywords : Implementation, The self-help housing stimulant assistance program

Supervisor I



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

Supervisor II



Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Indralaya, Januari 2021
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Kebijakan Publik	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.3 Beberapa Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.2 Teori Implementasi Yang Digunakan	18
2.3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	19
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Definisi Konsep	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27

3.5	Informan Penelitian.....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7	Teknik Analisis Data	29
3.8	Sistematika Penulisan	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN.....		32
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1	Kondisi Geografis dan Kondisi Alam	32
4.2	Gambaran Umum Tim Teknis Kabupaten Batang Hari	35
4.3	analisis dan pembahasan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Batang Hari.	40
4.3.1	Organisasi	42
4.3.2	Interpretasi	58
4.3.3	Penerapan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Edward III	14
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	16
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran diadopsi dari Model Charles O Jones	23
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Provinsi Jambi.....	32
Gambar 4. 2 Peta Wilayah Kabupaten Batang Hari	34
Gambar 4. 3 keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu No 221/KPTS-SNVT-PPPJ/2019	43
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Tim Teknis Kabupaten Batang Hari	46
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Tim Pelaksana BSPS Desa Hajran	46
Gambar 4. 9 Ruang Bidang Perumahan Dinas Perkim.....	53
Gambar 4. 10 Web RTLH perumahan.....	53
Gambar 4. 11 Ruang Bidang Perumahan Dinas Perkim.....	53
Gambar 4. 12 Ruang Kantor Perangkat Desa Desa Hajran	54
Gambar 4. 13 Lingkungan Kantor Desa Hajran.....	54
Gambar 4. 14 Wawancara Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Perumahan Swadaya.....	57
Gambar 4. 14 Tahapan Proses Pelaksanaan BSPS dalam bentuk uang	64
Gambar 4. 15 Wawancara Kasi Pembangunan Desa Hajran	70
Gambar 4. 16 Wawancara Ketua Kelompok Penerima Bantuan.....	74
Gambar 4. 17 Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap I	76
Gambar 4. 18 Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 2.....	77
Gambar 4. 19 Rumah Sebelum Pelaksanaan BSPS	82
Gambar 4. 20 Rumah Sesudah Pelaksanaan BSPS.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kecamatan yang mendapatkan BPS di Kabupaten Batang Hari.....	4	
Tabel 2 Data Rumah Layak Huni Tahun 2018 di Kabupaten Batang Hari.....	5	
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	21	
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	25	
Tabel 5. Tim Teknis Kabupaten Batang Hari Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2019	47	
Tabel 6. Daftar Nama Tim Pelaksana BPS Desa Hajran	50	

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
CPB	: Calon Penerima Bantuan
DRPB	: Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan
PSU	: Prasarana Sarana dan Utilitas
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
RLH	: Rumah Layak Huni
PKRS	: Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
PBRS	: Pembangunan Baru Rumah Swadaya
KPB	: Kelompok Penerima Bantuan
UMP	: Upah Minimal Provinsi

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan**
- 2. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Batang Hari**
- 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari**
- 4. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi**
- 5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi**
- 6. Pedoman Wawancara**
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**
- 8. Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Nomor : 221/KPTS-SNVT-PPPJ/2019 Tentang Perubahan Pembentukan Tim Teknis Kabupaten /Kota Se Provinsi Jambi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman ini termasuk ke dalam urusan pemerintah konkuren yang artinya menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar dan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Diketahui bahwa jumlah *backlog* perumahan di Indonesia saat ini mencapai 7,6 juta unit, hal ini menyebabkan pemerintah harus melakukan pembangunan agar tidak terjadi pemukiman yang kumuh. Demikian pula perumahan yang tidak mencukupi dan tidak memberikan jaminan keamanan, akan mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dan politik, yang akan menghambat pembangunan ekonomi (Habitat dalam Panudju 2009:16). Untuk memenuhi kebutuhan warga akan kepemilikan rumah atau peningkatan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ada banyak program yang diprakarsai

oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2018 Pasal 1 dijelaskan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat dengan BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan / meningkatkan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Adapun tujuan dari kegiatan BPSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk mendapatkan bantuan tersebut wajib memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan yaitu : merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki keluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya dan bersedia membuat pernyataan. Proses seleksi penerima BPSPS calon penerima wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan setelah itu akan di seleksi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), laporan calon penerima BPSPS akan diserahkan kepada Koordinator Fasilitator Kab/Kota, selanjutnya akan di sampaikan kepada PPK dan PPK akan menetapkan penerima BPSPS.

Dalam pengimplementasian program BPSPS melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten/kota

dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seleksi calon penerima BSPS, memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi. Badan pelaksana dilapangan program BSPS ini adalah Pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas unsur:

- a. SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai Ketua
- b. SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai Sekretaris
- c. SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai Anggota
- d. Camat di lokasi BSPS sebagai Anggota
- e. Kepala Desa/Lurah di lokasi BSPS sebagai Anggota

Pelaksanaan program BSPS bersumber dari dana APBN, penyaluran dana ini melalui bank/pos penyalur yang mempunyai tugas membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai dengan SK PPK. Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) merupakan pejabat yang di beri kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian PUPR. Dalam penyelenggaraan BSPS, PPK mempunyai tugas diantaranya menyalurkan bantuan dan melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank / pos penyalur, penyedia barang/jasa).

Pada tahun 2018 pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45 milyar dari dana APBN yang menyentuh 3.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 Kabupaten / Kota, hanya satu kabupaten yang tidak menerima program BSPS yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini dikarenakan sudah menerima program yang serupa dari Kementerian PUPR. Sedangkan pada tahun 2019 memperbaiki rumah sebanyak 4.500 unit melalui BSPS.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan program BSPS sejak tahun 2017, pada tahun 2017 ada dua kecamatan yang mendapatkan BSPS yaitu Kecamatan Pelayung dan Bajubang. Tahun 2018 Kecamatan Mersam dan Muara Tembesi dan tahun 2019 Kecamatan Batin XXIV, Bajubang dan Pelayung. Berikut tabel kecamatan yang mendapatkan BSPS dari tahun 2017-2019.

Tabel 1 Data Kecamatan yang mendapatkan BSPS di Kabupaten Batang Hari.

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah
1.	2017	Bajubang	91 unit
		Pelayung	160 unit
2.	2018	Mersam	118 unit
		Muara Tembesi	114 unit
3.	2019	Bajubang	100 unit
		Batin XXIV	90 unit
		Pelayung	120 unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018

Tahun 2017 Kabupaten Batang Hari mendapatkan bantuan sebanyak 251 unit, dan pada tahun 2018 mendapatkan program BSPS sebanyak 232 unit. Sedangkan pada tahun 2019 dari delapan kecamatan pemerintah Kabupaten Batang Hari hanya memfokuskan tiga kecamatan untuk menerima program BSPS, kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Pelayung, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Batin XXIV dengan jumlah 310 unit rumah.

Tabel 2 Data Rumah Layak Huni Tahun 2018 di Kabupaten Batang Hari.

No	Kecamatan	Jumlah RLH	Jumlah RTLH
1.	Mersam	5.173	596
2.	Muara Tembesi	5.450	628
3.	Muara Bulian	12.069	1,390
4.	Batin XXIV	4.954	571
5.	Pemayung	5.259	606
6.	Muaro Sebo Ulu	5.754	663
7.	Muaro Sebo Ilir	3.216	371
8.	Bajubang	7.384	851

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten Batang Hari adalah 54.935 unit, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Batang Hari yaitu sebanyak 5.676 dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terbesar terdapat di Kecamatan Muara Bulian, kemudian Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Muaro Sebo Ulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tidak layak huni masih tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Kemudian dalam pelaksanaan program BSPS sejak 2017 hingga 2019, ada tiga kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Kecamatan Muaro Sebo Ilir, sementara dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Muaro Sebo Ulu termasuk ke dalam 3 kecamatan yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak hal ini menunjukkan belum meratanya pelaksanaan BPS di Kabupaten Batang Hari. Pada surat edaran Direktorat Jenderal Perumahan Nomor 07 Tahun 2018 mengatakan bahwa pengusulan untuk calon lokasi BPS ditujukan kepada Menteri Rakyat c.q Direktur Jenderal

Penyediaan Perumahan yang di lakukan pemerintah, yakni: Bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Usulan calon lokasi BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang mengacu data pada basis data terpadu yang di lengkapi dengan data jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.

Berdasarkan tabel 1 diatas, masih banyak masyarakat yang belum mampu memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni, hal ini menyebabkan terjadinya *backlog* perumahan. Diketahui *backlog* perumahan secara nasional saat ini mencapai 7,6 juta unit (Muhammad Choirul Anwar, 2019). Sementara *backlog* perumahan Kabupaten Batang Hari berdasarkan pendataan pada tahun 2018 sebanyak 16.918 unit (*Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018*).

Program BSPS merupakan suntikan biaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok yang terdiri dari 15 – 20 orang setiap kelompoknya. Pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong-royong dimasyarakat agar kembali kuat. Akan tetapi karena minimnya pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan dan pengawasan dari tim teknis desa, mengakibatkan masyarakat yang memperoleh bantuan BSPS tidak melaksanakan prinsip gotong-royong, masyarakat penerima bantuan BSPS membangun rumah masih dilakukan secara individu.

Dari banyaknya desa/ kelurahan di Kabupaten Batang Hari yang telah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari tahun 2017 hingga tahun 2019, maka penelitian ini akan mengambil di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Batin XXIV dengan mengambil contoh dari satu desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2019, yaitu Desa Hajran. Desa Hajran merupakan salah satu desa yang mendapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di Desa Hajran terdapat 322 KK, sementara masih terdapat rumah yang tidak layak huni yaitu sebanyak 66

rumah dan ada 62 rumah tangga yang belum memiliki rumah. Selain itu dari enam desa yang melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Batin XXIV, Desa Hajran Merupakan desa yang akses menuju ke desanya sulit di jangkau karena berada di seberang sungai.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena itu perlu diteliti sehingga penyelenggaraan program BSPS ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses pengimplementasian program BSPS di Kabupaten Batang Hari.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:
Bagaimana pelaksanaan implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Hajran Kabupaten Batang Hari Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini ialah untuk mengetahui implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Hajran Kabupaten Batang Hari Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi kepentingan akademis, menambah wawasan pengetahuan, dan masukan bagi kajian ilmu administrasi publik untuk mengetahui implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Batang Hari Jambi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Batang Hari Jambi. Selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan dan pemikiran bagi semua pihak yang terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polic)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT. Alumni.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Sari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik teori, proses, dan studi kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.

Peraturan perundangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018*
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*
- Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Nomor 23/KPTS-SNVT-PPPJ/2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap-1 Tahun Anggaran 2019*

Sumber lain-lain:

- Muhammad Choirul Anwar. 2019. *BP Tapera, Juru Selamat Backlog Rumah 7,6 Juta Unit di RI?*. Jakarta: CNBC Indonesia. (diakses pada 21 Januari 2020).
- Sakay. C, Sanni. P, Hanazato. T, 2011. *Rural to Urban Squatter Settlement: The Micro Model of Generalization Self-Help Housing in Lima Peru*. 2011 International

Conference on Green Building and Sustainable Cities.
doi:10.1016/j.proeng.2011.11.2040 (diakses pada 17 Desember 2019).

- Sari, Ika Amelia, Cathas Teguh Prakoso dan Hariati. 2018. *Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kertanegara*. Volume 6, Nomor 4. (diakses pada 18 Desember 2019).
- Sulistiyo, Mudji, D.B Paranoan dan Burhanudin. 2013. *Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kertanegara*. 1 (1): 328-341. (diakses pada 18 Desember 2019).